LAPORAN AKHIR

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

Disusun Oleh :

Dini Lestari Ningsih
NIM E0061221049

Untuk Memenuhi Persyaratan

Kelulusan Program Diploma III

Program Studi Administrasi Perkantoran

PROGRAM DIPLOMA III

FAKULTAS LMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

Diajukan Oleh:

Dini Lestari Ningsih
NIM E0061221049

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing Laporan Akhir

Pontianak, 04 Februari 2025

Widha Anistya Suwarso, S.IP,M.A

NIP 199101252019032015

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Dini Lestari Ningsih
NIM E0061221049

Telah disidangkan

Pada Tanggal, 23 Mei 2025

Widha Anistya Suwarso S.IP, M.A — Pembimbing : .....
NIP 199101252019032015

Drs. Sugino, M.Si — Penguji : .....
NIP 196609041995121001

Pontianak, Juni 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tanjungpura

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP 197205212006041001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Dini Lestari Ningsih
NIM	: E0061221049
Tempat, Tanggal Lahir	: Lingga, 22 Juli 2004
Jurusan/Program Studi	: Administrasi Perkantoran/D-III
Fakultas	:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi	: Universitas Tanjungpura Kota Pontianak

Menyatakan bahwa laporan akhir yang penulis buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dengan judul "Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak". Merupakan Karya Sendiri bukan duplikat dari karya orang lain, kecuali yang tertera dalam rujukan laporan akhir ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Pontianak, 04 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Dini Lestari Ningsih

NIM E0061221049

RINGKASAN LAPORAN AKHIR

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola data administrasi pemerintahan secara efisien, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Namun, beberapa kendala telah muncul dalam penerapannya, terutama terkait pemahaman pegawai terhadap aplikasi ini. Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui pemahaman pegawai mengenai penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang baru saja diterapkan pada bulan September tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Penulisan laporan akhir ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif untuk menggambarkan sejauh mana sistem ini diterapkan dan memberikan dampak terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Melalui proses pengumpulan data terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) meliputi; pemahaman pegawai yang masih kurang mengenai penggunaan aplikasi ini, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya monitoring dam evaluasi yang rutin untuk mengindentifikasi kendala dan memberikan solusi secara cepat, dan hal ini masih belum bisa diatasi oleh pegawai itu sendiri sehingga perlu bantuan dari pusat untuk kesalahan tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan akhir ini adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sebuah aplikasi yang diwajibkan oleh Kemendagri. SIPD ini sangat mendukung dan mempermudah pekerjaan yang dulakukan pegawai dalam pelaksanaan program kerja dan Penganggaran untuk mengsikronisasikan pelaksanaan program kerja dan penganggaran disetiap satuan kerja perangkat daerah dengan sistem yang ada pada sub bagian perencanaan dan keuangan, namun kenyataanya hal ini menghambat perkerjaan pegawai, beberapa permasalahan pegawai terhadap aplikasi yang baru saja diterapkan ini pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak, kurangnya keterampilan pegawai mengenai penggunaan aplikasi SIPD ini serta hambatan yang terjadi pada saat proses penginputan yang tidak bisa diatasi. Saran yang dapat diberikan adalah, pemerintah dapat memberikan sosialisasi secara berkala, jika pegawai mengalami kendala atau masalah dalam penginputan dapat melakukan konsultasi karena permasalahan yang ada pegawai tidak dapat mengatasinya sendiri, setidaknya pemerintah dapat menyediakan pihak konsultasi disetiap daerah atau provinsi.

MOTTO

“Setetes keringat Orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk menuju kesuksesan”

Orang Tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.

-Ika df

Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya.

-Ik

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada saya, kekuatan, Kesehatan, rezeki, dan berbagai ilmu pengetahuan sehingga saya bisa menyelesaikan Laporan Akhir yang sederhana ini dengan baik dan tepat waktu. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan ibunda kandungku, bapak dedek dan mama dedek sebagai tanda bukti, untuk cinta pertama ku dan panutan ku, bapak Nasmuri, Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan yang senantiasa memberikan yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar ini.

Dan untuk pintu surgaku, ibunda Neti Herawati, terimakasih telah berkorban nyawa saat melahirkan penulis kedunia, hormat dan rasa terima kasih yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan, hiduplah lebih lama kesayanganku. Terima kasih untuk bapak dedek dan mama dedek.

2. Ayahanda dan ibunda angkatku yang tercinta, terimakasih untuk ayahku yang menjadi cinta pertamaku juga, panutanku, kesayanganku, ayahanda Rochmani, sosok ayah yang senantiasa menunggu kepulangan putrinya di teras rumah, yang senantiasa menemani penulis bergadang dalam pengerjaan tugas tugas kuliah, terimakasih sudah merawatku sedari kecil tanpa kekurangan dan tanpa

kekerasan dari dirimu itu, sehingga penulis bisa menyelesaikan Perkuliahan ini walaupun ayah sendiri tidak dapat menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah.

Pintu surga keduaku, Ibunda Suhartini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis. Terima kasih sebesar besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan motivasi, masakan yang enak, hidup yang selalu bahagia bersama mu, serta do'a yang tak pernah putus beliau berikan. Ibu menjadi penguat dan pengingat yang paling hebat. Hidup lah yang lebih lama kesayanganku, adek persembahkan karya ini untuk ayah dan mama.

3. Untuk saudara dan saudariku, Mauliyati, , lili Suryani, Lilis Suryati, Asmaul akhmar, dan Bagaskara Pratama Rahagi, terimakasih atas dukungan serta segala do'a, motivasi, semangat dan canda tawa yang telah diberikan kepada penulis, dan terimakasih kepada bocilku tersayang Muhammad Gibran yang senantiasa menemani penulis setiap malam dalam penyelesaian Karya yang sederhana ini

4. Terimakasih kepada sepupuku, Anggi Dwi Pangestu, Nanda Tri Andriani, Dhea lestari, dan Mita santia, yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada penulis, senantiasa membuat penulis merasakan kebahagiaan, dan lupa akan kesedihan, telah melindungi, menasehati, memberikan doa, dan semangat. Karya yang sederhana ini ku persembahkan untuk kalian.

5. Dan untuk sahabatku tercinta, Nur Aziza dan Dellia Puspita, Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan canda tawa yang dijalani bersama selama perkuliahan, Pertemuan yang tidak disengaja membawa kita sejauh ini. Untuk Nur Aziza Terimakasih atas suka rela nya memberikan tumpangan di

kost kepada penulis jika jam perkuliahan ditunda, terimakasih waktu hampir 2tahunnya di masa perkuliahan itu iza, terimakasih atas segala support, segala dukungan, canda dan tawa, suka dan dukanya, seorang sahabat yang tidak mementingkan egonya sendiri, senantiasa mengalah dengan penulis, sukses selalu bu camat ku,

Dellia Puspita seorang sahabat yang selalu menjadi garda terdepan dan selalu mendegarkan keluh kesah di masa-masa sulit penulis, semangat yang tidak didapatkan dimanapun, memberikan berbagai saran saat Penulis mengalami kesulitan dan membantu material untuk memenuhi keperluan Penulis, dan keperluan dalam menyelesaikan karya ini. Terimakasih tekondelku, selalu ada dirimu disetiap suka duka ku. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *See you on top, guys!*

6. Dan yang terakhir, untuk diriku sendiri Dini Lestari Ningsih, sosok perempuan yang sederhana, perempuan yang banyak cobaan dalam perjalanan kuliahnya, sosok perempuan yang hampir putus asa dalam menjalani perkuliahannya. Terimaksih telah hadir di dunia dan sudah bertahan sampai sejauh ini melewati banyaknya tantangan rintangan yang alam semesta berikan. Terimakasih atas pencapaian yang telah di raih dalam hidup mu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini. Terima kasih sudah berusaha menjadi manusia, anak, kakak, adik dan teman yang baik bagi orang disekelilngmu, mari kuatkan lagi bahu dan kencangkan lagi sepatu mu agar mampu berlari lebih kencang lagi. Berbahagialah di mana pun kamu berada dini. Selalu rayakan

kehadiranmu di dunia ini tentang segala hal yang membuatmu tetap hidup. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal-hal baik di alam semesta.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan Akhir ini penulis selesaikan dengan judul "**Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak".**

Laporan Akhir ini dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Diploma-III Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat Kota Pontianak. Dalam pelaksanaan pengerjaan laporan akhir ini penulis diberikan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik.
2. Dhidik Apriyanto, SE, M.Si, selaku Koordinat Studi Administrasi Perkantoran Diploma-III yang telah banyak memberikan kemudahan terkait perizinan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta penelitian.
3. Widha Anistya Suwarso, S.IP, M.A, selaku dosen pembimbing laporan akhir yang telah memberikan waktu dan arahan dalam pengerjaan laporan akhir ini.

4. Drs. Sugino, M.Si selaku dosen penguji laporan akhir yang telah memberikan waktu serta masukan terhadap laporan akhir ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan berlangsung.

6. Teman-teman terdekat penulis, Adel, Ayu, Sintia, dan Vicka selama masa kuliah berlangsung serta senantiasa memberikan motivasi serta dukungan selama penulisan laporan akhir ini.

Hasil dari penyusunan Laporan Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan laporan akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna sebagai bahan evaluasi bagi penulis. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada proses penyusunan laporan akhir ini.

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR ..... **i**
RINGKASAN LAPORAN AKHIR ..... **iv**
MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penulisan 1
1.2 Tujuan dan Manfaat 3
1.2.1 Tujuan penulisan 3
1.2.2 Manfaat penulisan 4
1.3Tinjauan Pustaka 4
1.3.1 Penerapan 5
1.3.2 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 7
1.3.3 Informasi Keuangan Daerah 11
1.3.4 Informasi Pembangunan Daerah 14
1.4 Metode Penulisan 20
1.4.1 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 21
1.4.2 Teknik Analisis Data 23
BAB II PROFIL SINGKAT DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK 25
2.1 Selayang Pandang Dinas Perhubungan Kota Pontianak 25
Visi, Misi, dan Motto: 27
2.2 Lokasi Kantor Dinas Perhubungan Kota Pontianak 29
2.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak 30
2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi 31

2.4 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah 38
BAB III PELAKSANAAN PKL 40
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 40
3.2 Analisa Data 46
3.2.1 Komunikasi 50
3.2.2 Sumber Daya 51
3.2.3 Disposisi 53
3.2.4 Struktur Birokrasi 55
BAB IV PENUTUP 58
4.1 Kesimpulan 58
4.2 Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 61
BIODATA 64
LAMPIRAN 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kantor Dinas Perhubungan Kota Pontianak.....29

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak 30

Gambar 3.1 Contoh pembelian barang pada Aplikasi E-Katalog 5.0 41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak..... 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Permohonan Magang MBKM 65

Lampiran 1.2 Surat Balasan Konfirmasi Magang 66

Lampiran 1.3 Surat Tugas 67

Lampiran 1.4 Surat Keerangan Selesai Magang 68

Lampiran 1.5 Lembar Penilaian dari mentor..... 69

Lampiran 1.6 Sertifikat..... 70

Lampiran 1.7 Penginputan RKA Th 2025 pada SIPD.RI..... 70

Lampiran 1.8 Dokumentasi wawancara 71

Lampiran 1.9 Pedoman wawancara..... 72

Lampiran 1.10 Logbook Magang MBKM 77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Teknologi Informasi yang sangat mempengaruhi sistem pengolah data dan sistem pada proses perencanaan penganggaran dan program untuk melakukan pengolahan data diperlukan sistem informasi yang mendukung transformasi digital dalam pengelolaan data dan proses pemerintahan. Dengan memanfaatkan teknologi Informasi secara optimal, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, pada gilirannya akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Teknologi informasi telah menjadi pilar penting dalam pengelolaan pemerintahan modern, yang memungkinkan otomatisasi banyak proses manual, mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk pengolahan data dan pembuatan laporan.

Berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Menurut Permendagri pasal 2 NO. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pemerintahan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah. Dalam pasal 6 Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang system informasi pemerintah daerah (SIPD) ditegaskan kembali bahwa SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik. Dan sebagaimana pada ayat (1) SIPD dapat diakses melalui situs jaringan

resmi Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan mengenai akses SIPD yang dibatasi pada situs resmi Kemendagri bertujuan untuk menciptakan lingkungan pengelolaan informasi yang aman.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini diterapkan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak pertengahan bulan September Tahun 2024 yang seharusnya penginputan dilakukan di awal Tahun maka kesannya seperti dipaksakan karena aplikasi ini diwajibkan oleh pemerintah langsung untuk Instansi Pemerintahan Daerah dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan lebih, transparan, dan akuntabel pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Pengembangan aplikasi SIPD merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, SIPD diharapkan dapat mempermudah pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam administrasi publik, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengembangan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik, Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan transportasi yang efektif menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak, sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

(PKL) yang dilaksanakan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan pada Sub

Bagian Perencanaan dan Keuangan berkaitan erat dengan penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama mengikuti PKL, ternyata aplikasi ini seharusnya diterapkan di awal Tahun 2024, namun adanya ketertinggalan beberapa instansi termasuk Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Dishub melakukan penginputan pada pertengahan bulan September Tahun 2024, hal ini merupakan faktor utama mengenai pemahaman pegawai dalam menggunakan aplikasi ini masih kurang sehingga hal ini menjadi kendala dalam proses pengaplikasian SIPD untuk berjalan lebih efektif dan efisien. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. kurangnya pelatihan pada pegawai, sosialisasi yang dilakukan masih belum membantu pegawai dalam memahami mengenai aplikasi ini
2. Jaringan dan server yang terkadang mengalami gangguan

Oleh karena itu, penulis tertarik dan ingin mengangkat topik ini sebagai Laporan Akhir dengan judul **"Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak**"

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat merupakan hal yang menjadi bagian penting untuk menggambarkan maksud dari laporan tersebut serta kontribusinya. Berikut tujuan penulisan Laporan Akhir yang dikemukakan oleh penulis

1.2.1 Tujuan penulisan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai

terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

1.2.2 Manfaat penulisan

Manfaat penulisan dibagi menjadi dua yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan kepada penulis bagaimana pemahaman pegawai mengenai Penerapan Sistem Informasi Daerah (SIPD) dalam menunjang Perencanaan Anggaran dan Program Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
   b. Sebagai sarana penulis dalam pengembangan teori-teori yang telah dipelajari serta sebagai referensi untuk selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

   Penulis berharap dengan adanya penulisan ini dapat memberikan masukan atau saran mengenai bagaimana Penerapan Sistem Informasi Daerah (SIPD) dalam menunjang Perencanaan penganggaran serta Menyusun program kerja pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

1.3 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang apa yang sudah diketahui dan belum diketahui terkait topik tersebut, serta membangun landasan teoritis yang kuat. Berikut Tinjauan Pustaka yang penulis gunakan:

1.3.1 Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa para ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut (Usman 2002), penerapan (Implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiayan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut (Setiawan 2004) penerapan (Implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan pelaksanaan, biokrasi yang efektif.

Model yang digunakan dalam penedekatan suatu implementasi kebijakan yang diciptakan oleh (Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono 2005, 99) yang disebut dengan ***A Model of Policy Implementation*** (1975). mengatakan Suatu keberhasilan dalam implemtasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya baik itu sumber daya manusia yang memiliki peran penting untuk menentukan suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Sehingga dalam pelaksanaan implementas kebijakan dapat dipengaruhi oleh variabel sebagai berikut.Standar sasaran kebijakan serta tujuan kebijakan

a) Sumber daya
b) Karakteristik pada organisasi sebagai pelaksana

c) Sikap bagi pelaksana

d) Komunikasi yang baik dalam organisasi serta pelaksanaan

e) Lingkungan baik ekonomi, sosial maupun politik

Menurut Wahab, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam Keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan ke dalam Masyarakat.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain 1996, 1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan (Ali 1995, 1044).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan ialah:

a) Adanya program yang dilaksanakan.

b) Adanya kelompok target, yaitu Masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab 1990, 45).

1.3.2 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Memasuki era modern, perkembangan sistem informasi di Indonesia berkembang begitu cepat. Pada era modernisasi tidak dapat dielakkan karena negara-negara didunia sudah memasuki revolusi industry 5.0 yang penerapannya sudah berbasis teknologi otomatis tanpa memerlukan banyak tenaga sumber daya manusia dalam proses pelaksanaannya (Siagian, n.d).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi (PANRB) pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 24 Desember 2018, dengan Nomor 95 Tahun 2018 SPBE pasal 7 tentang SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional. PERPRES Nomor 39 tahun 2019 pasal 2 tentang Satu Data Indonesia (SDI) bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan. Oleh karena itu, peluncuran Sistem Informsi Pemerintah Daerah (SIPD) diawali dengan key note speech dari menpan RB selaku koordinator tim SPBE dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 12 Desember 2023. PERPRES Nomor 54 Tahun 2018 tentang STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK) Terdapat 15 Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang salah satunya terkait dengan penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran di

tingkat pusat daerah dan desa untuk sinergi pengentasan kemiskinan ekstrim. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dan UU 23 Tahun 2014 pasal 395 dimana pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintah Daerah lainnya. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sebuah inovasi baru yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang diatur dengan Pemendagri No 70 Tahun 2019 yang berlaku sejak 27 September 2019 untuk pengganti Sistem Infromasi Manajemen Daerah (SIMDA). Selain itu, penerapan SIPD diharapkan mampu menyatukan persepsi mengenai pengeloaan sistem informasi pemerintah daerah yang tepat dan menjadi sarana dalam mengintegrasikan serta mensinergikan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai wujud penerapan sistem informasi pemerintah daerah menjadi lebih cepat, inovatif dan berkualitas. Hal tersebut selaras dengan (Nasution dan Nurwani 2021), mengungkapkan bahwa diharapan dengan memperluas inisiatif pembangunan di semua sektor akan memungkinkan transmisi informasi yang sempurna dan partisipasi yang luas untuk semua orang.

Ruang lingkup SIPD meliputi, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Dalam implementasinya berdasarkan ketentuan amanah yang ada, SIPD diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan informasi pemerintahan daerah, pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas: informasi

pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pemerintahan daerah tersebut dikelola dalam SIPD. Kemudian, selain informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah tersebut, pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah lainnya. Pada prinsipnya SIPD, dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik. Dalam teknis pelaksanaannya SIPD dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya (Rhandu dkk 2022) menyatakan bahwa penerapan SIPD ini berbentuk website dengan tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik, akan tetapi dalam pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras dan Kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah daerah.

Menurut (Wurara et al 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapannya kurang efisien karena kurangnya pemahaman pegawai dalam mengoperasikan SIPD. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Ekaputra 2021), hasil penelitian dalam implementasi SIPD kurang efektif dari sisi kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan.

Untuk mndapatkan gambaran terkait penerapan SIPD, menggunakan model implementasi. Menurut (George Edward III 1980) implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Dalam pandangan Edwards III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi (communications),

sumberdaya (resources), disposisi (dispositions), dan struktur Birokrasi (bureaucratic structure).

Secara umum, sistem informasi pemerintah merupakan gabungan dari perangkat keras, perangkat lunak, dan anggota staf yang bekerja secara berurutan untuk saling membantu dalam mengolah data untuk menciptakan hasil akhir berupa informasi-informasi (Dengen & Hatta, 2009). Dalam rangka mencapai tujuan organisasi pada semua tingkatan Pemerintah Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, SIPD merupakan pengelolaan suatu informasi secara metodis sesuai kinerja dengan prinsip efisiensi dan efektivitas (KAUR, 2008). Mewujudkan keterbukaan informasi publik merupakan tujuan dari SIPD. Standar minimal yang harus dicapai oleh SIPD diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan akses informasi publik kepada warga. Salah satu aspek tata kelola yang baik adalah "transparansi, yang didasarkan pada arus informasi yang bebas; perlu untuk mengungkapkan informasi" (Remaja & Gede, 2017).

(Sinurat dan Panjaitan 2017, 86), mengemukakan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang bernilai uang, termasuk segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan hati-hati, yang melibatkan banyak langkah.

SIPD ini memuat sistem keuangan daerah, sebagai sarana untuk pengumpulan, pengolahan, penyajian dan refrensi dalam komunikasi informasi keuangan daerah dan juga sebagai pengendalian maupun pemantauan serta evaluasi atas pendanaan

dan defisit anggaran daerah dimana sistem ini diakses langsung oleh Pemerintah Pusat.

1.3.3 Informasi Keuangan Daerah

Dalam Bab IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai informasi keuangan daerah. Informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik yang paling sedikit memuat sebagai berikut:

1. Informasi perencanaan anggaran daerah, yang dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik. Tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah tersebut meliputi:

a) penyusunan KUA dan PPAS

b) penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah

c) penyusunan rancangan APBD

d) penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

2. Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, yang dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan 81 Sistem Informasi Serta Laporan dan Evaluasi daerah berbasis elektronik. Tahapan pelaksanaan dan keuangan daerah tersebut meliputi:

a) Penatausahaan Kupelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

b) pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana

c) pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah

d) pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan

e) pelaksanaan dan penatausahaan belanja

f) pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.

3. Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, yang dihasilkan dari tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/ semesteran/ tahunan. Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah tersebut meliputi:

a) laporan realisasi anggaran

b) laporan perubahan saldo anggaran lebih

c) laporan operasional

d) laporan perubahan ekuitas

e) neraca

f) laporan arus kas

g) catatan atas laporan keuangan

4. Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, yang dihasilkan dari proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik. Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik tersebut. Tahapan ini meliputi:

a) Rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya.

b) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya.

5. Informasi barang milik daerah, yang dihasilkan dari tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik. Tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik tersebut meliputi:

a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

b) Pengadaan

Lebih lanjut (Sinurat 2018, 1) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negara. Sementara itu (Moenek dan Suwanda 2019, 11) menjelaskan pengelolaan keuangan daerah merupakan proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pemantauan (evaluasi) penggunaan keuangan yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam rangkaian perhitungan APBD. Sedangkan menurut (Khusaini 2018, 2), pengelolaan keuangan daerah mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. SIPD ini juga memuat sistem perencanaan pembangunan daerah serta sistem pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah. Hal ini mengenai data tentang pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Apakah dapat mengelola data dan informasi yang terkait dengan perencanaan dengan baik. Pembangunan daerah melibatkan berbagai elemen terkait, Pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta dapat menjadi dasar dalam pembaruan data dan informasi perencanaan, sera Pembangunan dari daerah.

1.3.4 Informasi Pembangunan Daerah

Dalam Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai infmasi pembangunan daerah. Informasi pembangunan daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis, dan profil pembangunan daerah. Pada prinsipnya informasi pembangunan daerah paling sedikit memuat:

1. Data perencanaan pembangunan daerah
2. Analisis dan profil pembangunan daerah
3. Informasi perencanaan pembangunan daerah.

Analisis pembangunan daerah adalah penjabaran atas hasil pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya. Sementara itu, profil pembangunan daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional. Informasi pembangunan daerah dikelola oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian proses penyelenggaraan pembangunan daerah. Terkait data perencanaan pembangunan daerah, telah diatur bahwa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi prinsip satu data Indonesia sesuai dengan

ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Dalam implementasi pelaksanaannya, pengelolaan data berbasis elektronik provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui tahapan: perencanaan data, pengumpulan data, pengisian data berbasis elektronik, dan pemeriksaan data berbasis elektronik. Pengelolaan data ini dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Bappeda, produsen data, dan/ atau wali data. Pada dasarnya, dalam pengelolaan data tersebut, daerah dapat membentuk tim pengelolaan data sesuai kebutuhan daerah yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia mencakup pendekatan top-down dan bottom-up, di atas kertas untuk menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dan aspirasi lokal dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun kenyataannya, tuntutan daerah tidak sepenuhnya diperhitungkan, dan sebagian besar usulan proyek yang didasarkan pada tuntutan daerah dibuat oleh tingkat yang lebih rendah dalam rapat koordinasi yang mempertimbangkan usulan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini karena usulan tersebut telah dihapuskan tanpa pertimbangan. Akibatnya, proposal akhir yang diserahkan ke Pusat cenderung didominasi oleh proyek-proyek yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, khususnya pemerintah negara bagian dan pusat. Meskipun terdapat mekanisme koordinasi formal (proses bottom-up), perencanaan pembangunan daerah sebenarnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Banyak permasalahan yang muncul ketika melaksanakan perencanaan daerah.

Permasalahan lain yang sering muncul dalam bidang ini adalah (Bank Dunia, 2003, 47-56):

1) Propenas dan Propeda bukanlah rencana yang berkesinambungan karena hanya diproduksi setiap lima tahun sekali. Mirip dengan Poldas, perencanaan secara umum diartikan sebagai program pembangunan, namun tidak menggambarkan outcome atau hasil, juga tidak ada kaitannya dengan anggaran.

2) Masih belum jelas kapan dan bagaimana perencanaan top-down dan bottom-up akan diintegrasikan. Demikian pula, siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan integrasi, atau apa yang akan terjadi jika daerah otonom memutuskan untuk mengabaikan Propenas.

3) Terdapat kesenjangan yang besar dalam rencana lapangan ketika mempertimbangkan potensi finansial. Hanya rencana regional tahunan yang mencakup opsi keuangan tersebut.

4) Rencana tersebut terlalu berfokus pada anggaran dan proyek konstruksi dibandingkan mempertimbangkan keseluruhan anggaran.

Menurut (Blakely 1989), ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Tahapan yang berurutan tersebut meliputi:

1) pengumpulan dan analisis data
2) Pemilihan Strategi Pembangunan Daerah
3) Pemilihan Proyek- Proyek Pembangunan
4) Pembuatan Rencana Tindakan
5) Penentuan Rincian Proyek

6) Persiapan Perencanaan Secara Keseluruhan dan Implementasi.

Tahapan perencanaan data merupakan tahapan identifikasi kebutuhan data daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan data paling sedikit memuat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Waktu perencanaan data dilaksanakan pada bulan Februari untuk pengumpulan data di tahun berjalan yang hasilnya dimuat dalam berita acara yang paling sedikit memuat:

1) Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah
2) Perencanaan waktu pengumpulan data
3) Perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik
4) Perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.

Dalam tahapan pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan berita acara sebagaimana dimaksud di atas. Sementara itu, tahapan pengisian data dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengisian data dalam berita acara sebagaimana dimaksud di atas. Adapun tahapan pemeriksaan data digunakan untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia. Waktu pemeriksaan data dilakukan paling lama bulan Januari setiap tahunnya terhadap data tahun sebelumnya yang hasilnya dimuat dalam berita acara yang paling sedikit memuat:

1) Pernyataan bahwa data hasil pengumpulan dan pengisian oleh produsen data dapat dipertanggungjawabkan.
2) Pernyataan bahwa data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

Selanjutnya, hasil pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud di atas, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah
2) Rencana pembangunan jangka menengah daerah
3) Rencana pembangunan tahunan daerah.

Sementara itu, dokumen perangkat daerah meliputi:

1) Rencana strategis perangkat daerah
2) Rencana kerja perangkat daerah.

Dalam ketentuan yang ada, pada prinsipnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD, sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Secara teknis, dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam perkembangan yang terkini telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tanggal 5 Oktober 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya juga telah perbarui kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, mengenai ketentuan analisis dan profil pembangunan daerah, telah diatur bahwa analisis dan profil pembangunan daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Analisis dan profil pembangunan daerah menjadi dasar dalam memperbarui data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Adapun mengenai informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup:

1) Kondisi geografis daerah
2) Demografi
3) Potensi sumber daya daerah
4) Ekonomi dan keuangan daerah
5) Aspek kesejahteraan Masyarakat
6) Aspek pelayanan umum
7) Aspek daya saing daerah.

Tentang keuangan dan ekonomi daerah serta kondisi kestabilan. Informasi adalah kunci untuk kesejahteraan masyarakat, pelayanan yang baik, serta peningkatan daya saing daerah, yang terdapat dalam perencanaan pengembangan daerah. Informasi mengenai Keuangan Daerah merupakan bagian dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Mengelola data keuangan daerah melalui berbagai

elemen terkait dalam upaya untuk lebih efektif dan efisien, penting untuk selalu memperhatikan asas, Akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang baik, daerah tersebut maksud dari pesan elektronik itu adalah: Penyusunan Anggaran Daerah

1) Pengaturan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

2) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

3) Tanggung Jawab Pelaksanaan Keuangan Daerah.

1.4 Metode Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dalam Menyusun laporan akhir ini menggunakan metode penulisan deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek dalam penelitian. Tujuan utama dari penulisan deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang hidup, detail, dan mendalam tentang subjek yang dibahas.

Menurut (Erwin 2019, 46).Penelitian deskriptif merupakan pemaparkan apa yang terjadi pada di suatu wilayah atau lapangan dalam sebuah kancah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut sifat, kondisi dan jenis. Selain itu penelitian deskriptif dilakukan dengan mempunyai tujuan utama untuk memberikan suatu gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif

Kemudian Menurut (Sumadi Suryabrata 2012, 76) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti penelitian deskriptif itu adalah

akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode metode deskriptif. Dapat disimpulkan bahwa metode penulisan deskriptif adalah suatu cara atau teknik untuk menggambarkan suatu objek, peristiwa, atau fenomena dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan rinci, sehingga pembaca bisa membayangkan atau merasakan seperti apa objek atau peristiwa yang didapatkan selama melaksanakan dua bulan praktek kerja lapangan pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

1.4.1 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

A. Teknik pengumpulan Data

a) Observasi

Menurut (Sugiyono 2018, 229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung mengenai objek, peristiwa, atau fenomena tertentu secara sistematis dan terstruktur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang perilaku, kejadian, atau situasi yang terjadi pada tempat PKL, dengan dilakukannya pengamatan atau kejadian yang terjadi ditempat tersebut.

b) Wawancara

Menurut (Sugiyono 2018, 467) wawancara ialah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana wawancara semiterstruktur dilakukan dengan mengajukan

pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstuktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan langsung dengan narasumber.

c) Dokumentasi

Menurut (Sugiyono 2015, 273) Dokumen adalah suatu bentuk atau sekumpulan catatan yang berisi tentang sebuah alur dari kejadian yang telah berlalu. Dokumentasi adalah Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, yaitu dengan mengumpulkan data seperti, buku, artikel, laporan, foto, rekaman, maupun dokumen lainnya yang memiliki nilai informasi. Dokumentasi yang penulis dapatkan yaitu berupa RKA Tahun 2025, Kwitansi SPJ, dan Kwitansi SP2D.

B. Alat Pengumpulan data

1. Alat Observasi

Alat Observasi yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data adalah berupa buku catatan, dimana penulis mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis amati untuk mendapatkan informasi dari yang penulis lihat.

2. Alat wawancara

Alat wawancara yang penulis gunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data dapat berupa:

a) Buku catatan: berfungsi bagi penulis untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada pegawai pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu Ibu Mia Bayusanti SE yang menjabat sebagai Penata Pelaksana Keuangan dan menulis jawaban dari pertanyaan tersebut.

b) Smartphone: berfungsi bagi penulis baik dalam bentuk audio maupun video, digunakan untuk merekam percakapan pada saat wawancara. Hal Ini berguna untuk merekam jawaban dengan akurat, sehingga penulis dapat mendengarkan atau menonton ulang rekaman untuk analisis lebih lanjut.

3. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi yang digunakan penulis dalam mendapatkan atau mengumpulkan data dapat berupa:

a) Scanner atau Alat Pindai: untuk mengonversi dokumen fisik menjadi bentuk digital

b) Kamera (Foto dan Video): untuk mendokumentasikan gambar atau video yang berkaitan dengan penelitian. Ini berguna untuk merekam objek, situasi, atau peristiwa yang relevan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata- kata.

c) Alat Perekam dari Smartphone: yang dapat digunakan untuk merekam percakapan, wawancara dengan narasumber..

1.4.2 Teknik Analisis Data

Menurut (Kaelan 2012, 129) yang dimaksud dengan teknik analisis data ialah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari suatu hasil wawancara, catatan lapangan dan juga dokumentasi dari hasil penelitian tersebut dengan cara mengorganisasikan sebuah data dalam kategori, menjabarkan

dan memilih mana yang lebih penting dan membuat kesimpulan agar mempermudah penelitian tersebut baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan Laporan Akhir ini, yaitu dengan menggunakan teknik Analisa Data pendekatan Kualitatif. Data yang sudah diperoleh oleh penulis melalui teknik dan alat pengumpulan data tersebut kemudian dianalisa menggunakan teknik Kualitatif.

Menurut (Afrizal 2017, 13) Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode studi ilmu sosial di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata dan perilaku manusia, tetapi tidak berusaha untuk menghitung atau menganalisis angka-angka. Jadi, metode penelitian kualitatif adalah kegiatan mengumpulkan data melalui aktivitas sosial yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Setelah penulis memperoleh data-data yang cukup dan valid, data tersebut diolah untuk menunjang penulis dalam mengidentifikasi masalah yang penulis bahas.